



ບົຍນິຊຸງ ງຽວປິສຸນິ ຕາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຕາລິ ບົຍນິຊຸງ ງຽວປິສຸນິ ຕາລິ

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ຕາລິ ບົຍນິຊຸງ ງຽວປິສຸນິ ຕາລິ (ບົຍນິຊຸງ ງຽວປິສຸນິ ຕາລິ) ງຽວປິສຸນິ ຕາລິ

Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Denpasar - Bali (80235) Telepon : (0361) 226974
Laman : www.bappeda.baliprov.go.id, Pos-el : bappeda@baliprov.go.id

Bali, 27 Juni 2024

- Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
3. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
di
Denpasar

**SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.28.000.7.5/2279/BPPE/BAPPEDA**

No	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Semester I Tahun 2024.	1 (satu) buku.	Dengan hormat disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710814 200003 1 010



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





BAPPEDA PROVINSI BALI

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II



2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pengendalian dan evaluasi ini merupakan proses pembuktian untuk memastikan adanya korelasi antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, hasil evaluasi ini dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam penyusunan perencanaan kedepannya.

Laporan hasil evaluasi triwulan II (kedua) pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian target rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2024, meliputi:

- a. Realisasi antara capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024,
- b. Realisasi antara penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, dan
- c. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi.

Selanjutnya, hasil evaluasi akan menjadi basis data untuk pelaksanaan evaluasi kinerja lainnya dan dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.

Demikian Evaluasi Hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 S.d Triwulan II disusun dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan dipakai sebagai acuan dalam memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19710814 200003 1 010
---	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1-3
1.3 Dasar Hukum.....	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-4

BAB 2 EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Kondisi Perekonomian Daerah Pada Triwulan II Tahun 2024.....	2-1
2.2 Demografi Penduduk	2-16
2.3 Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah	2-20
2.4 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD	2-24
2.5 Instrumen Evaluasi Terhadap Hasil RKPD	2-28
2.6 Telaah Hasil Evaluasi	2-28

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan.....	3-1
3.2 Rekomendasi.....	3-1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Year To Year (y to y) 2023-2024	2-2
Gambar 2.2	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Dalam Ribu Rp) ...	2-5
Gambar 2.3	Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Bali bulan Januari 2023-Mei 2024 (Persen)	2-8
Gambar 2.4	Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2023	2-10
Gambar 2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023	2-11
Gambar 2.6	Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2024	2-15
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2022–Februari 2024	2-16
Gambar 2.8	Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 (Dalam Ribu Jiwa)	2-18



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on year (y-on-y) Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Mei 2024	2-7
Tabel 2.2	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Mei 2024 Kabupaten/ Kota Wilayah Cakupan IHK di Provinsi Bali (2022=100)	2-8
Tabel 2.3	Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini.....	2-9
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2023.....	2-12
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	2-13
Tabel 2.6	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2022–Februari 2024	2-14
Tabel 2.7	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	2-18
Tabel 2.8	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022 dan Tahun 2023	2-19
Tabel 2.9	Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023.....	2-20
Tabel 2.10	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026	2-22
Tabel 2.11	Perkembangan Pagu Masing-Masing Perangkat Daerah sampai dengan Tanggal 22 Juni 2024	2-25
Tabel 2.12	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan II bulan Mei Tahun 2024) Provinsi Bali. (terlampir)	2-29
Tabel 2.13	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024	2-29
Tabel 2.14	Rekapitulasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang Telah, Belum Mencapai Target dan yang Melebihi Target pada Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024	2-33



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah selain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan RKPD, pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup daerah provinsi mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD provinsi yang mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Kegiatan pemantauan dan supervisi RKPD digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah Provinsi telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan pembangunan daerah akan lebih efektif bila memanfaatkan dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri yang menerapkan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



siklus mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan terakhir melalui tahapan pengendalian evaluasi yang dilakukan secara utuh dan berkesinambungan sehingga apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan hasil yang didapat setelah melakukan evaluasi merupakan umpan balik (*feed back*) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depannya. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup provinsi. Gubernur juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 yang mencakup:

1. Pengendalian Kebijakan RKPD.

Pengendalian kebijakan dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPD, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Pengendalian Pelaksanaan RKPD.

Pengendalian pelaksanaan dilakukan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

3. Evaluasi Hasil RKPD

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun berkenaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah Provinsi Bali serta mengarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan publik. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil RKPD dimana mencakup sejauh mana capaian atas berbagai target indikator pembangunan daerah oleh perangkat daerah yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Bali. Melalui evaluasi diharapkan dapat diketahui apakah *output* dan *outcome* kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui penilaian terhadap kinerja capaian indikator yang telah disusun selanjutnya dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah tertentu yang perlu diambil untuk dapat meningkatkan atau mengakselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 untuk triwulan II dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi Bali dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan hasil capaian kinerja RKPDP Provinsi Bali yang baik tentunya akan mendukung dan mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bali tercapai dengan baik pula serta dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi RKPDP dilaksanakan setiap triwulan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah. Evaluasi Hasil RKPDP Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 untuk triwulan II diharapkan menjadi bahan penyusunan Perubahan RKPDP Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut telah diuraikan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan (1) konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut maksud kegiatan Evaluasi Hasil RKPDP Provinsi Bali Tahun 2024 triwulan II adalah:

1. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPDP Semesta Berencana Tahun 2023 telah sesuai dengan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
2. Menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPDP Tahun 2024 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam APBD Provinsi Bali Tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah

1. Memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPDP Provinsi Bali Tahun 2024 berdasarkan realisasi anggaran.
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Bali Tahun 2024.
3. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
4. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPDP triwulan II ini sebagai sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulanan RKPDP Provinsi Bali berikutnya.
5. Menjadikan hasil evaluasi RKPDP triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam Evaluasi Hasil RKPDP Semesta Berencana Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2024 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang Evaluasi RKPD, maksud dan tujuan Evaluasi RKPD dasar hukum Evaluasi RKPD, serta sistematika penulisan Evaluasi RKPD Provinsi Bali Tahun 2024.

- **BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2023**

Bab ini menjelaskan tentang Kondisi Perekonomian Daerah pada Triwulan II Tahun 2024, Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Program/Kegiatan RKPD, Instrumen Evaluasi terhadap Hasil RKPD, Capaian Target Kinerja dan Kendala/Permasalahan Yang Dihadapi.

▪ **BAB III PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan, dan acuan dalam penyusunan dokumen Evaluasi Hasil RKPD untuk tahun ke depan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB 2

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH PADA TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendistribusikan pendapatan yang lebih merata antar golongan dan wilayah, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah serta mengantisipasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Provinsi Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Sebagai daerah tujuan wisata dunia yang menonjolkan kebudayaan dan kesenian dipadu dengan panorama dan keindahan alam, menjadikan Bali sebagai daerah yang memiliki ciri khas tersendiri. Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Dalam hal evaluasi, sehubungan tidak semua indikator kinerja daerah bisa diukur pada pertengahan tahun maka dalam evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II ini hanya ditampilkan beberapa realisasi indikator kinerja daerah dengan sumber data dari website BPS Provinsi Bali. Beberapa indikator makro daerah yang dievaluasi, sebagai berikut.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

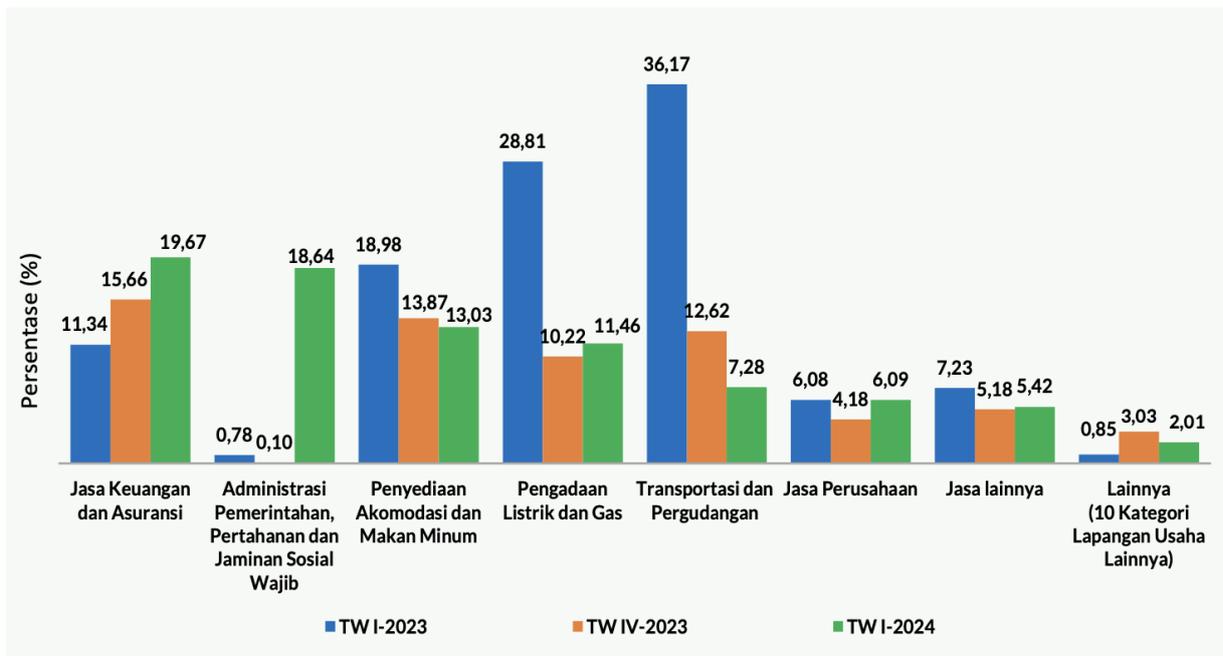
Perekonomian Bali pada triwulan I-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp69,61 triliun atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100), PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp39,72 triliun.

Ekonomi Bali selama periode triwulan I-2024 berkontraksi sedalam 4,68 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2023 (q-to-q). Ditinjau dari sisi produksi, kontraksi paling dalam dicatatkan oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sedalam 14,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) berkontraksi sedalam 45,59 persen.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada periode triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,98 persen. Dikaji dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 19,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (Pk-LNPRT) tumbuh sebesar 80,93 persen.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan I-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 20,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 55,12 persen.





Gambar 2.1.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali
Secara Year To Year (y to y) 2023-2024

Pada triwulan I-2024, nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp39,72 triliun, turun dibandingkan dengan triwulan IV-2023 yang sebesar Rp41,67 triliun. Penurunan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan I-2024 berkontraksi 4,68 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2023 (q-to-q).

Memasuki awal tahun 2024, beberapa fenomena berkontribusi pada perekonomian Bali periode Januari-Maret 2024. Cuaca ekstrem menyebabkan fluktuasi produksi dan harga komoditas pertanian, menurunnya realisasi belanja pemerintah berimbas pada penurunan nilai tambah yang tercipta. Momentum perayaan Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi diduga mampu menjadi katalis penggerak perekonomian Bali tercermin dari meningkatnya output industri pengolahan. Disisi lain, peningkatan nilai kredit yang disalurkan dan oleh bank umum dan BPR diperkirakan menjadi stimulus penciptaan nilai tambah pada aktivitas keuangan. Keseluruhan fenomena tersebut selanjutnya bermuara pada corak perekonomian Bali yang berkontraksi pada triwulan I-2024 secara q-to-q.

Hampir seluruh lapangan usaha penyusun PDRB Provinsi Bali pada triwulan I-2024 berkontraksi namun menyisakan tiga lapangan usaha yang tercatat tumbuh secara q-to-q. Menurunnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan I-2024 mengakibatkan kontraksi terdalam pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sedalam 14,99 persen. Faktor cuaca ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah di Bali diperkirakan turut andil pada penurunan nilai tambah sedalam 8,82 persen pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai kontributor terbesar juga berkontraksi sedalam 3,95 persen. Disisi lain, beberapa Lapangan



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Usaha yang tumbuh ekspansif yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,44 persen dan Industri Pengolahan sebesar 6,35 persen.

Secara q-to-q, kontraksi terdalam tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Penurunan realisasi belanja pemerintah utamanya pada komponen belanja pegawai dan penyusutan berdampak pada penciptaan nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I-2024, komponen belanja pegawai berkontraksi sedalam 3,81 persen. Sementara komponen penyusutan tercatat turun pada kisaran 59 persen secara q-to-q.

Penurunan nilai tambah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan utamanya disebabkan karena produksi komoditas tanaman pangan khususnya padi, perkebunan, dan perikanan yang menurun. Berdasarkan data hasil Kerangka Sampel Area (KSA), produksi padi pada triwulan I-2024 turun sedalam 38,84 persen secara q-to-q. Komoditas tanaman pangan kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar turut mengalami penurunan produksi. Penurunan juga terjadi pada komoditas perkebunan baik perkebunan semusim maupun tahunan. Subkategori perikanan yang berkontribusi cukup besar, secara total mengalami penurunan output utamanya pada kelompok perikanan Tangkap di Laut dan perikanan Budidaya.

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai kontributor terbesar perekonomian Bali juga mengalami kontraksi secara q-to-q. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) diperkirakan turut andil dalam menahan penciptaan nilai tambah baik pada aktivitas penyediaan akomodasi maupun makan minum. Pada triwulan-I 2024, jumlah kunjungan wisman tercatat turun sedalam 0,21 persen. Angka sementara kunjungan wisnus juga berkurang pada kisaran 18 persen. Penurunan aktivitas pada penyediaan akomodasi terkonfirmasi dari angka sementara TPK yang turun khususnya pada kelompok hotel bintang.

Ditengah catatan kontraksi tersebut, beberapa lapangan usaha tumbuh impresif yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi dan Industri Pengolahan. Momen Hari Raya Galungan dan Kuningan serta Hari Suci Nyepi diperkirakan mampu memberikan stimulus pada kinerja sektor keuangan di Bali serta mendorong peningkatan permintaan pada produk hasil industri pengolahan. Hal tersebut tercermin dari data posisi kredit Statistik OJK yang menunjukkan peningkatan nilai kredit yang disalurkan oleh bank umum dan BPR masing-masing sebesar 0,33 persen dan 0,29 persen pada periode triwulan-I 2024. Peningkatan permintaan pada produk hasil industri pengolahan utamanya pada kelompok industri tekstil dan perlengkapan sarana upacara keagamaan yang tergabung pada kelompok industri pengolahan lainnya.

Ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2024 (q-to-q), ekonomi Bali berkontraksi sedalam 4,68 persen utamanya bersumber dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedalam 1,19 persen. Sementara lapangan usaha dengan sumbangan terbesar lainnya yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sedalam 0,86 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang sedalam 0,82 persen. Gabungan dari 14 lapangan usaha lainnya tercatat menahan pertumbuhan ekonomi Bali dengan sumbangan sedalam 1,81 persen pada triwulan I-2024 (secara q-to-q).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Ekonomi Bali pada triwulan I-2024 jika dibandingkan dengan triwulan I-2023 tercatat tumbuh 5,98 persen. Ekonomi Bali terus bergerak bahkan nilai tambah yang tercipta sudah melampaui kondisi ekonomi seperti sebelum pandemi Covid-19. Peningkatan kinerja keuangan dan transaksi keuangan masyarakat, naiknya realisasi belanja pemerintah, serta jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang tumbuh signifikan, diperkirakan menjadi faktor pendorong ekonomi Bali terus tumbuh pada triwulan I-2024 secara y-on-y. Catatan tersebut menjadi Gambaran terus bangkitnya perekonomian Bali pada triwulan I-2024.

Pada triwulan I-2024, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga 19,67 persen secara y-on-y. Statistik OJK menunjukkan peningkatan nilai kredit yang disalurkan baik yang disalurkan oleh bank umum maupun BPR secara y-on-y. Berdasarkan data output oleh bank umum pada laporan yang dihimpun Bank Indonesia mengalami peningkatan komponen pendapatan sekunder hingga diatas 190 persen. Secara keseluruhan fenomena tersebut mendukung peningkatan nilai tambah yang tercipta.

Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 18,64 persen. Kenaikan realisasi belanja pemerintah khususnya pada komponen belanja pegawai mampu mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi pada triwulan-I 2024 dibandingkan triwulan-I 2023. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan karena perbedaan periode pembayaran THR pegawai pemerintah. Pada tahun 2024, THR pegawai pemerintah dibayarkan pada periode triwulan-I 2024 tepatnya di akhir Maret. Sementara pada tahun 2023, pembayaran THR dilakukan di bulan April (periode triwulan II-2023).

Peningkatan nilai tambah pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,03 persen secara y-on-y didorong oleh jumlah kunjungan wisman dan wisnus yang terus meningkat bahkan sudah melampaui kondisi sebelum pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan wisman pada triwulan I-2024 tercatat mencapai 1,34 juta kunjungan, naik 31,05 persen dibandingkan triwulan I-2023 sebanyak 1,03 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisnus juga meningkat pada kisaran 38 persen secara y-on-y. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kenaikan produksi jasa akomodasi di Bali. Indikator Tingkat Penghunian Kamar (TPK) tumbuh baik untuk kelompok hotel bintang maupun non bintang pada periode triwulan-I 2024 dibandingkan triwulan I-2023.

Struktur PDRB Bali pada triwulan I-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan besaran nilai tambah Rp14,37 triliun atau 20,64 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang nilai tambah sebesar Rp9,35 triliun atau setara 13,43 persen, disusul Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dengan nilai tambah sebesar Rp 7,19 triliun atau 10,32 persen dari total perekonomian Bali.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2024 (y-on-y), ekonomi Bali yang tumbuh sebesar 5,98 persen bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan sumbangan sebesar 2,24 persen kemudian disusul oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,95 persen. Kontributor terbesar lainnya yaitu dari Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil 0,85 persen. Sedangkan gabungan dari 14 lapangan usaha lainnya memberi sumbangan sebesar 1,95 persen.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



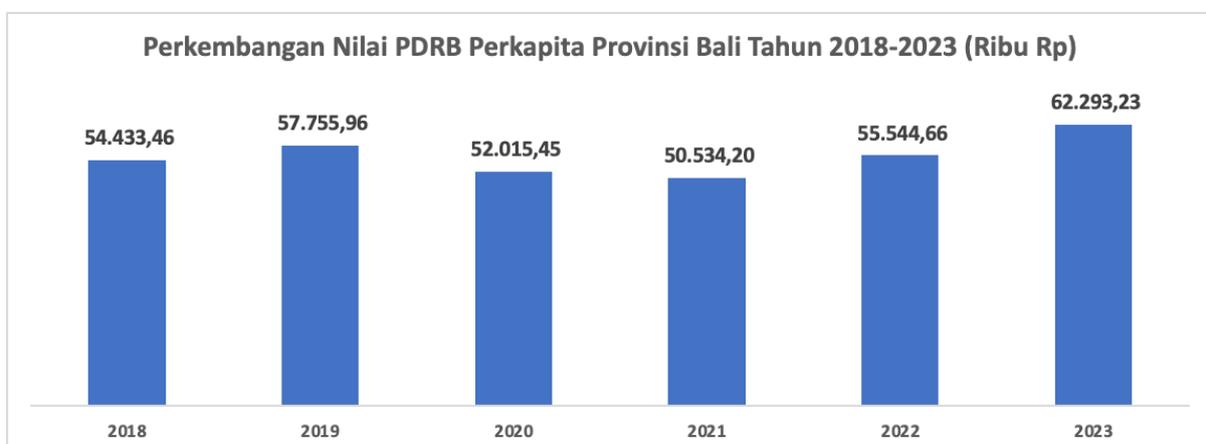
2.1.2. PDRB Perkapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Selama Pandemi Covid-19, nilai PDRB Perkapita Provinsi Bali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Bali turun ke angka Rp50,53 Juta. Ketika pandemi sudah mulai terkendali dan aktivitas masyarakat serta ekonomi dibuka kembali secara perlahan, nilai PDRB Perkapita Bali turut meningkat cukup signifikan ke angka Rp55,54 Juta dan pada tahun 2023 meningkat lebih signifikan lagi ke angka Rp62,29 Juta.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.2.

Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Dalam Ribu Rp)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2.1.3. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2024

Pada Mei 2024 secara *year on year* (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 3,54 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,17. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Badung sebesar 4,01 persen dengan IHK sebesar 105,64 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 2,92 persen dengan IHK sebesar 106,64.

Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 7,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,38 persen; kelompok transportasi sebesar 1,87 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,23 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,12 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,22 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Secara bulanan (*month to month/m-to-m*), Provinsi Bali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,10 persen. Sementara secara *year to date* (y-to-d) tercatat inflasi sebesar 1,68 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Kabupaten Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Bali di 4 kabupaten/kota tersebut, pada Mei 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,54 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,51 pada Mei 2023 menjadi 107,17 pada Mei 2024. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (*year to date/ytd*) Mei 2024 tercatat inflasi sebesar 1,68 persen, sedangkan inflasi bulanan (m-to-m) tercatat deflasi sebesar 0,10 persen.

Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 7,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,38 persen; kelompok transportasi sebesar 1,87 persen;

kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,23 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,12 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,22 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Pada Mei 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,34 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,21 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran



sebesar 0,41 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen. Di sisi lain, terdapat kelompok pengeluaran yang tidak memberikan andil inflasi atau memberikan andil inflasi sangat kecil, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Mei 2024 antara lain beras, bawang merah, tomat, bawang putih, cabai merah, tarif parkir, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Akademi/Perguruan Tinggi, pisang, nasi dengan lauk, Sigaret Putih Mesin (SPM), daging ayam ras, minyak goreng, kue basah, emas perhiasan, kol putih/kubis, kopi bubuk, gula pasir, kue kering berminyak, dan pembalut wanita. Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi y-on-y dengan memberikan sumbangan deflasi antara lain bahan bakar rumah tangga, tongkol diawetkan, sawi hijau, daging babi, sabun cair/cuci piring, kentang, vitamin, jeruk, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, bensin, canang sari, detergen cair, sabun mandi cair, sabun mandi, telepon seluler, mie kering instan, pepaya, sabun detergen bubuk, salak, dan pakaian bayi.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil deflasi m-to-m pada bulan Mei 2024 antara lain beras, tomat, daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, telur ayam ras, buncis, pepaya, angkutan antar kota, jeruk, vitamin, kangkung, kacang panjang, buah naga, dan semangka. Sementara itu, komoditas yang menahan laju deflasi m-to-m dengan memberikan sumbangan inflasi antara lain bawang merah, tarif parkir, kol putih/kubis, jagung manis, nasi dengan lauk, bawang putih, kue kering berminyak, terong, minyak goreng, cabai merah, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, bawang bombay, emas perhiasan, ayam goreng, cuci kendaraan, bubur, canang sari, dan shampo.

Tabel 2.1.

IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m), *Year to Date* (y-to-d), dan *Year on year* (y-on-y) Provinsi Bali Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Mei 2024

No.	Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Desember 2023	IHK Mei 2024	Tingkat	Tingkat	Tingkat	Andil	Andil
					Inflasi m-to-m	Inflasi y-to-d	Inflasi y-on-y	Inflasi m-to-m	Inflasi y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Mei 2024 ¹	Mei 2024 ²	Mei 2024 ³	Mei 2024	Mei 2024
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Umum (Headline)		103,51	105,40	107,17	-0,10	1,68	3,54	-0,10	3,54
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	104,35	108,58	112,40	-0,88	3,52	7,71	-0,28	2,34
2	Pakaian Dan Alas Kaki	101,78	103,20	103,37	0,11	0,16	1,56	-0	0,07
3	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,64	102,51	102,74	-0	0,22	0,10	-0	0,01
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,57	102,16	102,34	-0,04	0,18	-0,22	-0	-0,01
5	Kesehatan	100,19	101,52	101,57	-0,56	0,05	1,38	-0,01	0,04
6	Transportasi	109,30	110,16	111,34	0,86	1,07	1,87	0,09	0,21
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,61	99,81	99,60	-0	-0,21	-0,01	-0	-0
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105,21	107,33	108,55	0,16	1,14	3,17	-0	0,05
9	Pendidikan	100,81	104,06	104,08	-0	0,02	3,24	-0	0,22
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,67	102,68	105,97	0,69	3,20	4,23	0,07	0,41
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,73	104,70	105,93	0,31	1,17	2,12	0,03	0,20

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

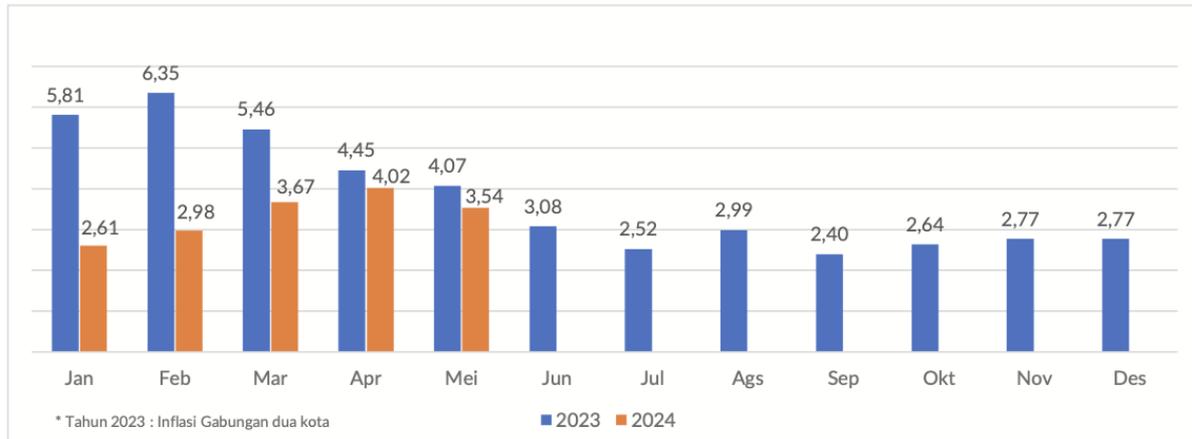


Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tingkat inflasi tahun kalender (year to date) Provinsi Bali pada Mei 2024 sebesar 1,68 persen yang didapat dari membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulan Mei 2024 terhadap IHK Bulan Desember 2023. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2024 terhadap Mei 2023 atau year on year) tercatat sebesar 3,54 persen. Secara bulan ke bulan inflasi Mei 2024 tercatat sebesar -0,10 persen.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.3.

Tingkat Inflasi *Year on Year* (y-on-y) Provinsi Bali bulan Januari 2023- Mei 2024 (Persen)

Pada bulan Mei 2024 secara *year on year* (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 3,54 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,17. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Badung sebesar 4,01 persen dengan IHK sebesar 105,64 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 2,92 persen dengan IHK sebesar 106,64. Secara *month to month*, inflasi tercatat di Kota Denpasar sebesar 0,05 persen. Deflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Buleleng sebesar 0,33 persen sedangkan deflasi terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 0,09 persen.

Tabel 2.2.

Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Mei 2024 Kabupaten/ Kota Wilayah Cakupan IHK di Provinsi Bali (2022=100)

Kabupaten/Kota	Mei 2024		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-t-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kab. Tabanan ¹⁾	109,36	3,56	-0,28
2 Kab. Badung ¹⁾	105,64	4,01	-0,09
3 Singaraja ³⁾	106,64	2,92	-0,33
4 Kota Denpasar ²⁾	107,47	3,52	0,05

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

Tabel 2.3.
Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
$GR \leq 0,20$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
$0,20 < GR \leq 0,39$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
$0,39 < GR \leq 0,59$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
$0,59 < GR \leq 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
$GR > 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

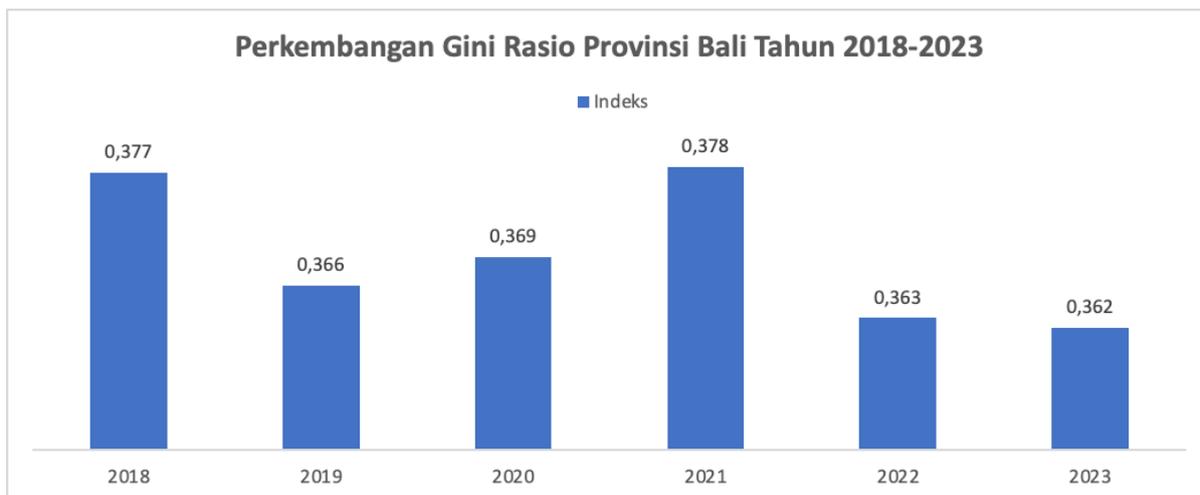
Sumber: BPS

Gini ratio Provinsi Bali pada 2022 tercatat sebesar 0,362 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami peningkatan dari kondisi 2022 dengan Gini Rasio 0,363 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi 2023 mengalami penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,367, angka ini membaik dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,371. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,290, nilai ini membaik jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294. Gini Rasio kedua daerah ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Tabanan merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,347. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,362. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar 0,280. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2023 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.





Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.4.

Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2023

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 % terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 % terbawah angkanya di bawah 12 %, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 %, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 %.

Pada September 2022, Persentase pengeluaran pada kelompok 40 % terbawah di Bali tercatat sebesar 18,82 % yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,97 % poin dibandingkan dengan 2021 yang tercatat sebesar 17,85 %, dan mengalami peningkatan 0,30 % poin jika dibandingkan dengan 2020 yang tercatat sebesar 17,55 %.

Menurut wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2022, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan Persentase penduduk berpendapatan rendah tertinggi di Provinsi Bali yaitu 23,92% sedangkan terendah berada di Kabupaten Klungkung dengan angka 19,39%.

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (PPP), yang ditentukan dari nilai pengeluaran riil per kapita dan disparitas daya beli.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Pada tahun 2023, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini tercatat sebesar 77,10 atau tumbuh 0,86 % (meningkat 0,66 poin) dibandingkan capaian tahun 2022.

Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,98 tahun atau lebih lama 0,38 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2023 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,58 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,48 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,06 tahun, dari 9,39 tahun pada tahun 2022 menjadi 9,45 tahun pada tahun 2023.

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2023 tercatat sebesar 14,38 juta rupiah per tahun atau meningkat 440 ribu rupiah dibandingkan tahun 2022.

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2023. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 77,10 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,72 % per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali.

Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.5.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen
Tahun 2018-2023

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60	72,98
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,33	13,4	13,48	13,58
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39	9,45
Pengeluaran Perkapita	Rp000	13.886	14.146	13.929	13.820	13.942	14.382
IPM		74,77	75,38	75,50	75,69	76,44	77,10

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

2.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2023 sebesar 4,25% atau turun 0,32% poin dari tahun 2022. Persentase Penduduk miskin di Provinsi Bali meningkat selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 tercatat terdapat 3,78% penduduk Bali yang masuk kategori miskin, dan tahun 2020 meningkat menjadi 4,53%. Ketika pandemi sudah mulai terkendali di tahun 2022, Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode Maret tahun 2023 adalah 193,78 ribu jiwa, turun 11,9 ribu jiwa dari tahun 2022. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2022 cukup signifikan meskipun belum dapat menyamai jumlah penduduk miskin sebelum pandemi (tahun 2019).

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2023 yaitu sebesar 39,52 ribu jiwa atau 5,85% dari total penduduknya. Sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Klungkung dengan jumlah 10,22 ribu jiwa atau 5,61% dari total penduduknya. Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 6,56% sedangkan terendah adalah Kabupaten Badung yaitu 2,30%.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel 2.5.**Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2023**

No	Penduduk Miskin	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah (Ribuan Jiwa)	168,34	156,91	196,92	211,46	205,36	193,78
2	Persentase (%)	4,01	3,79	3,78	4,53	4,57	4,25

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

2.1.7. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 2,71 juta orang. Pada periode yang sama, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin menjadi 77,37%.

Pada Februari 2024, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,66 juta orang, meningkat 37,99 ribu orang dibandingkan kondisi Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meningkat sebanyak 59,79 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Jasa Lainnya yang berkurang sebesar 41,05 ribu orang.

Sebanyak 1,32 juta orang (49,66%) bekerja pada kegiatan formal, meningkat 4,16 persen poin dibanding Februari 2023. Pekerja di Bali pada Februari 2024 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah dengan persentase sebesar 29,99% (798,53 ribu orang).

Dibandingkan dengan Februari 2023, persentase setengah pengangguran turun sebesar 0,48 persen poin menjadi 2,10%, sementara persentase pekerja paruh waktu sebesar 26,85% (naik 0,78 persen poin). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Februari 2024 sebesar 1,87%, turun 1,86 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

a. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,51 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 2,71 juta orang (77,37%), sisanya sebanyak 0,79 juta orang termasuk bukan angkatan kerja. Apabila dibandingkan Februari 2023, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 13,14 ribu orang (0,48%).

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 2,66 juta orang penduduk yang bekerja dan 50,68 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 37,99 ribu orang (1,45%) dan pengangguran berkurang sebanyak 51,14 ribu orang (50,23%).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang Aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Februari 2024 tercatat sebesar 77,37%, mengalami peningkatan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan TPAK Februari 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Februari 2024 tercatat sebesar 84,09%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 70,69%. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, TPAK laki-laki pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1,12 persen poin, sementara TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,72 persen poin.

Tabel 2.6.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2022–Februari 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022			Februari 2023			Februari 2024		Perubahan		
	Feb. 2022-Feb. 2023		Feb. 2023-Feb. 2024								
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen	ribu orang	persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.477,74	3.532,46	3.506,93	54,72	1,57	-25,53	-0,72				
Angkatan Kerja	2.682,84	2.726,63	2.713,49	43,79	1,63	-13,14	-0,48				
- Bekerja	2.553,06	2.624,81	2.662,80	71,75	2,81	37,99	1,45				
- Pengangguran	129,78	101,82	50,68	-27,96	-21,54	-51,14	-50,23				
Bukan Angkatan Kerja	794,90	805,83	793,45	10,93	1,38	-12,38	-1,54				
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,14	77,19	77,37	0,05	0,18						
- Laki-laki	83,92	82,97	84,09	-0,95	1,12						
- Perempuan	70,37	71,41	70,69	1,04	-0,72						

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

b. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Tidak terdapat perubahan pola penyerapan tenaga kerja pada tiga lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak di Provinsi Bali pada Februari 2024 jika dibandingkan dengan Februari 2023.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak di Provinsi Bali adalah Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,54%; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,29%; dan Industri Pengolahan sebesar 16,40%. Di antara ketiga lapangan pekerjaan penyerap tenaga kerja terbanyak selama periode Februari 2024, hanya pekerja pada lapangan pekerjaan Perdagangan Besar dan Eceran yang menurun.

Dibandingkan dengan Februari 2023, tercatat tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan jumlah pekerja terbesar, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan penambahan pekerja tertinggi sebesar 59,79 ribu orang, selanjutnya pada Transportasi dan Pergudangan meningkat sebanyak 16,09 ribu orang, serta Industri Pengolahan dengan penambahan jumlah pekerja sebanyak 14,29 ribu orang. Sementara

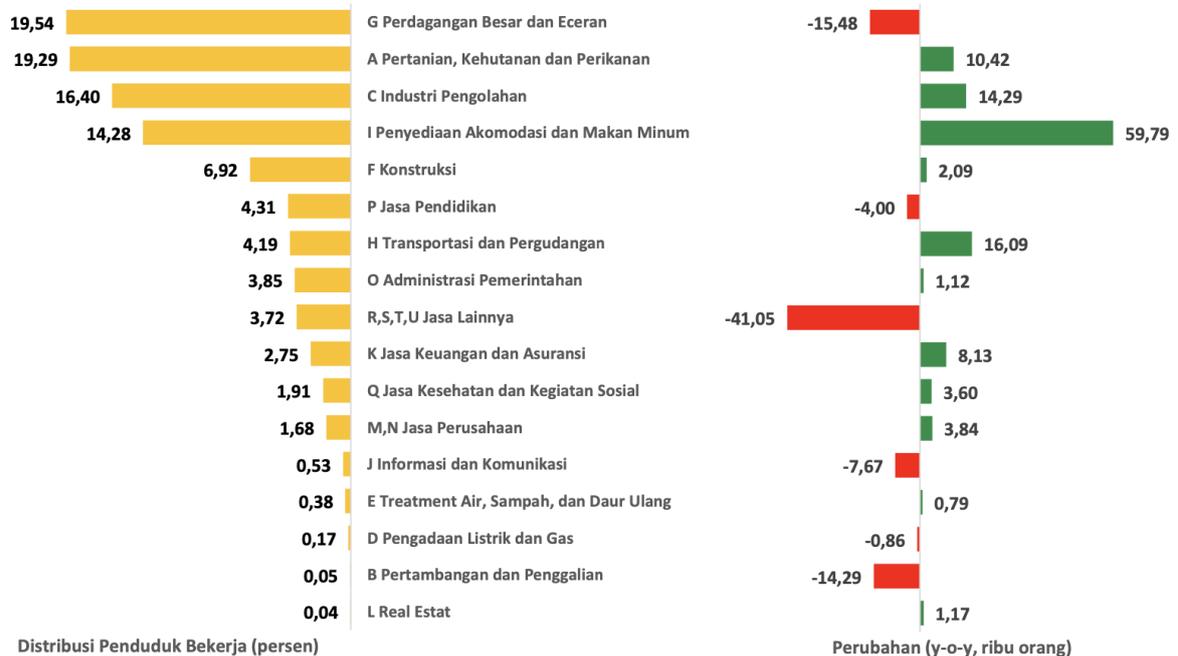


Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



lapangan pekerjaan dengan penurunan jumlah pekerja terbanyak adalah pada Jasa Lainnya yang berkurang sebanyak 41,05 ribu orang, selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran turun sebanyak 15,48 ribu orang, serta Pertambangan dan Penggalian dengan jumlah pekerja yang berkurang sebanyak 14,29 ribu orang.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.6.

Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2024

c. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pekerja di Bali didominasi oleh pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Sakernas Februari 2024 mencatat pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 46,44%. Sementara persentase terendah masih dipegang oleh pekerja bebas pertanian yang hanya mencapai 1,65%.

Dibandingkan dengan Februari 2023, pekerja status Buruh/Karyawan/Pegawai, Berusaha sendiri, Pekerja Bebas Non Pertanian, Pekerja Bebas Pertanian, dan Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,01 persen poin, 0,85 persen poin, 0,53 persen poin, 0,25 persen poin, dan 0,15 persen poin. Sementara status Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar, dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,96 persen poin, dan 1,84 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha



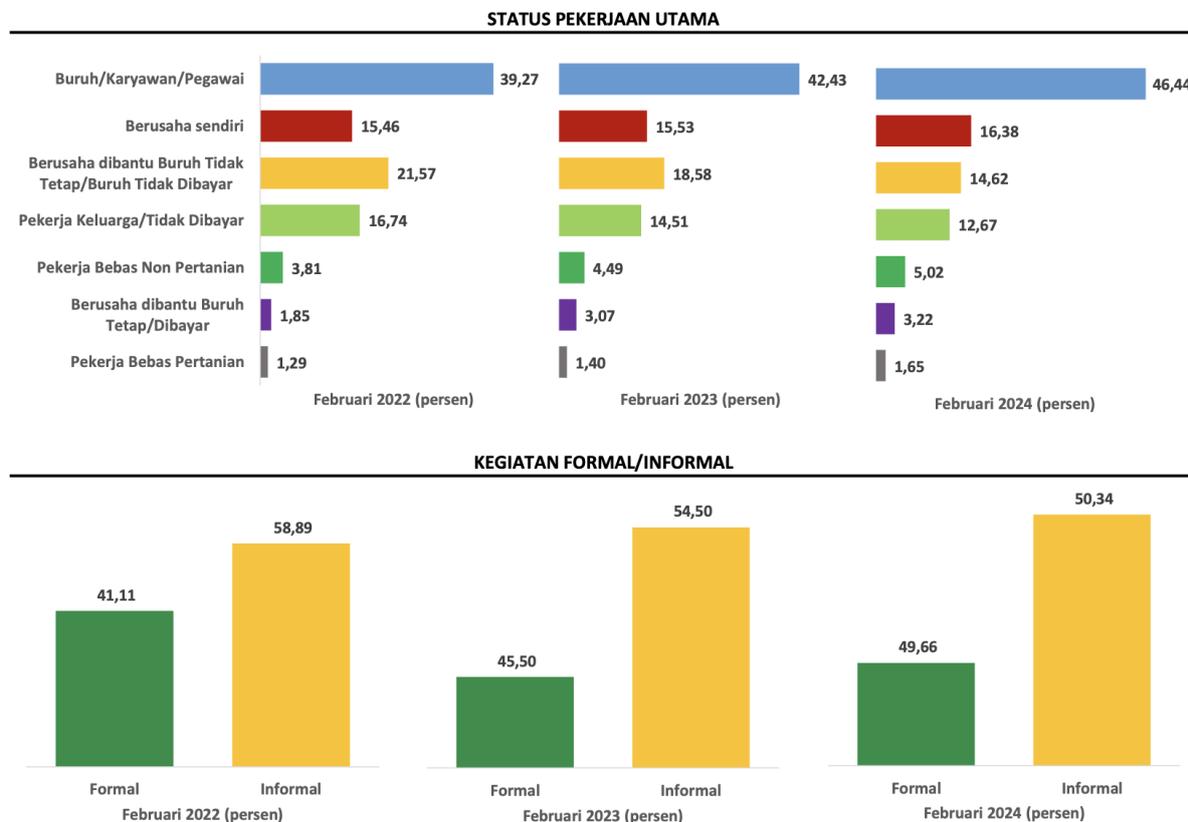
Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Pada Februari 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,32 juta orang (49,66%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,34 juta orang (50,34%). Dibandingkan Februari 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 4,16 persen poin.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.7.

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2022–Februari 2024

2.2. DEMOGRAFI PENDUDUK

2.2.1. Struktur Penduduk

Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah *Krama* Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada Kebudayaan Bali yang sangat kental berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (*mataksu*).

Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan *Krama* Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: "*hidup yang menghidupi, urip yang menguripi*".

Tata cara kehidupan *Krama* Bali yang menyatu dalam alam, baik secara "*sakala*" maupun "*niskala*" terdapat dalam nilai-nilai *Sat Kerthi*, yaitu *enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan* yang terdiri dari: (1) *Atma Kerthi*, (2) *Danu Kerthi*, (3) *Wana Kerthi*, (4) *Segara Kerthi*, (5) *Jana Kerthi*, dan (6) *Jagat Kerthi*.

Tata cara *kehidupan* masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang khas/unik, indah, dan suci/*metaksu* yang dituangkan menjadi nilai-nilai *Tri Hita Karana*: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/keharmonisan manusia, yaitu:

- a. Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan *Parahyangan*;
- b. Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan *Pawongan*; dan
- c. Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan *Palemahan*.

Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan *Krama* Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan *Upakara Pakerthi Yadnya* untuk *Sat Kerthi*, yaitu: (1) *Tumpek Landep*, (2) *Tumpek Wariga*, (3) *Tumpek Kuningan*, (4) *Tumpek Klurut*, (5) *Tumpek Uye atau Tumpek Kandang*, (6) *Tumpek Wayang*. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang *Manumadi*, yaitu sifat keutamaan kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang *Rta*, yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan *Dharma* dalam pengembangan kebudayaan, *lascarya*, yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan *swadharna* sebagai kewajiban hidup manusia, dan *Karma Phala*, yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat.

Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (*Krama*) Bali adalah sumber daya manusia yang *unggul*, yaitu *berkualitas* dan *berintegritas* dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan *Krama* Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter *jemet, seken, saja, beneh* dan *luwih*, serta *undagi* (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut *Krama* Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.



2.2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk

BPS Provinsi Bali telah merilis data perkiraan jumlah penduduk di Provinsi Bali selama tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.403.300 Jiwa dimana Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 808,90 ribu jiwa yang disusul kemudian oleh Kota Denpasar dengan penduduk 748,40 ribu jiwa.

Tabel 2.7.

Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	278,70	317,10	318,80	321,20	323,50
2	Kab. Tabanan	446,70	461,60	462,90	464,50	466,10
3	Kab. Badung	678,90	548,20	552,80	558,10	563,30
4	Kab. Gianyar	514,30	515,30	517,70	520,90	524,00
5	Kab. Klungkung	179,10	206,90	207,30	208,10	208,70
6	Kab. Bangli	227,60	258,70	259,30	260,40	261,40
7	Kab. Karangasem	417,00	492,40	494,90	497,50	500,00
8	Kab. Buleleng	661,90	791,80	796,40	802,80	808,90
9	Kota Denpasar	957,80	725,30	733,30	741,00	748,40
	Provinsi Bali	4.362,10	4.317,40	4.343,50	4.374,30	4.404,30

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2024

Gambar 2.8.

Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 (Dalam Ribu Jiwa)

2.2.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2024, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2022 diperkirakan adalah sebesar 101,10. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 102,65 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu dengan rasio jenis kelamin 100,19.

Tabel 2.8.

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin		
	2020	2022	2023
Jembrana	100,25	100,19	100,32
Tabanan	100,55	100,49	99,51
Badung	100,35	100,29	100,49
Gianyar	100,61	100,55	99,50
Klungkung	100,38	100,32	100,59
Bangli	101,47	101,42	101,32
Karangasem	102,71	102,65	100,88
Buleleng	101,13	101,07	100,87
Denpasar	102,03	101,97	102,09
Bali	101,16	101,10	100,69

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2024

2.2.4. Kepadatan Penduduk

Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2018-2023, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023. Kepadatan penduduk ini menggunakan luas wilayah Provinsi Bali bukan merupakan luas kawasan permukimannya sehingga disebut sebagai Kepadatan Penduduk Bruto.

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah stagnan sekitar 8 Jiwa/Ha. Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 58 Jiwa/Ha pada tahun 2021, 59 Jiwa/Ha pada tahun 2022, dan 60 Jiwa/Ha pada tahun 2023. Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 4 Ha pada tahun 2023,

Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel 2.9.

Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)		
			2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	84.913,38	4	4	4
2	Kab. Tabanan	84.931,59	5	5	5
3	Kab. Badung	39.874,92	14	14	14
4	Kab. Gianyar	36.430,53	14	14	14
5	Kab. Klungkung	31.396,01	7	7	7
6	Kab. Bangli	52.676,41	5	5	5
7	Kab. Karangasem	83.931,74	6	6	6
8	Kab. Buleleng	132.275,24	6	6	6
9	Kota Denpasar	12.571,45	58	59	60
	Provinsi Bali	559.001,27	8	8	8

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2024

2.3. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 disusun mengacu pada sasaran pada Peraturan Gubernur RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2024 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2024 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang disusun dengan tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema RKP Tahun 2024 tersebut akan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut.

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Arah kebijakan tersebut di atas kemudian akan diimplementasikan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

2.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel 2.10.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali 3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali
3	Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali
4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik 2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik 3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Sumber: Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

2.3.2. Prioritas Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata
- Prioritas 2 : Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
- Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
- Prioritas 4 : Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
- Prioritas 5 : Lingkungan Hidup
- Prioritas 6 : Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2024, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

**“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA,
SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”**

2.3.3. Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi *Krama* Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

a. Pembangunan yang Mengandung Dimensi *Sakala Niskala*

Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala* yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan *Hyang Widhi Wasa* sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

b. Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

c. Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.



- d. **Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis**
Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.
- e. **Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural**
Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.
- f. **Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah**
Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
- g. **Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali**
Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine Bali*; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

2.4. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tertuang dalam RKPD selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan yang diampudan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) masing-masing.

2.4.1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perkembangan pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah pada triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.11** berikut:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel 2.11.

Perkembangan Pagu Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.896.483.130.946
2	Dinas Kesehatan	661.912.311.404
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	389.566.476.955
4	Satuan Polisi Pamong Praja	49.451.684.083
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.331.459.283
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	37.338.313.080
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	34.492.620.172
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.383.335.700
9	Dinas Perhubungan	37.590.674.545
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	168.993.725.334
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.749.020.030
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.338.529.860
13	Dinas Kebudayaan	98.815.142.496
14	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	478.805.256.196
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.781.114.732
16	Dinas Pariwisata	15.115.655.997
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	79.794.844.069
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.875.497.201
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.933.352.320
20	Sekretariat Daerah	176.364.109.716
a	<i>Biro Pemerintahan Kesra</i>	<i>40.153.293.360,00</i>
b	<i>Biro Umum dan Protokol</i>	<i>120.549.935.366,00</i>
c	<i>Biro Hukum</i>	<i>6.603.263.220,00</i>
d	<i>Biro Organisasi</i>	<i>3.652.226.410,00</i>
e	<i>Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian</i>	<i>5.405.391.360,00</i>
21	Sekretariat DPRD	214.522.660.831
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.731.284.882
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.733.159.627.342
24	Badan Pendapatan Daerah	172.666.818.906
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.410.335.272
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	15.820.455.656
27	Badan Penghubung	8.718.553.74
28	Inspektorat	36.023.268.248
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	198.838.878.900
	Total	6.917.008.137.900

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2024

2.4.2. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Triwulan II dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 serta realisasi penyerapan anggaran kegiatan Perangkat Daerah sesuai dalam APBD Provinsi Bali Tahun 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



dan bertujuan untuk memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 berdasarkan realisasi anggaran serta memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah hingga Triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Bali Tahun 2024.

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali triwulan II Tahun 2024, alat/bahan yang dipergunakan adalah formulir Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta data pendukung berupa Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 dari masing-masing Perangkat Daerah. Evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan meliputi seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori urusan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja, keluaran kegiatan/sub kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun berkenaan.

2.4.3. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi hasil RKPD triwulan II dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali.

2.4.4. Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (SiDalev)

Pada tahun 2020 Bappeda Provinsi Bali telah mengembangkan sistem aplikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dikenal dengan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (SiDalev). Sistem informasi/sistem aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi e-RKPD yang masih bersifat *offline* dimana setiap tahun admin Perangkat Daerah harus menginput ulang program/kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan. Namun dengan SiDalev yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *E-Plan* sehingga admin Perangkat Daerah tidak perlu lagi melakukan input Program/Kegiatan sehingga mempermudah penyampaian informasi realisasi kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Bali.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam proses perencanaan dan penganggaran, maka aplikasi Sidalev perlu dilakukan update untuk dapat terintegrasi dengan aplikasi SIPD. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya pengintegrasian semua aplikasi yang berkaitan dengan kinerja ke dalam aplikasi E-SAKIP yang dirancang oleh Tim Pengembang Aplikasi E-SAKIP Diskominfo Provinsi Bali dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, maka aplikasi SiDalev masih dalam tahap uji coba dalam penggunaannya. Dengan demikian dalam proses evaluasi atas hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2024 sampai dengan Triwulan II (bulan Mei) masih menggunakan format manual (*excel*).



2.5. INSTRUMEN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah, dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap tujuan dengan indikator kinerja dan sasaran dengan indikator yang ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2024. Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi RKPD berdasarkan formulir T-C.19 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, ditambah dengan data pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan II Tahun 2024 dari masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diatas, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan formulir T-C.19.

Formulir T-C.19 memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan triwulan II (sampai dengan bulan Mei 2024) maupun secara kumulatif. Evaluasi meliputi seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program, kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
5. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.6. TELAHAH HASIL EVALUASI:

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung 7 prioritas pembangunan dengan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan adalah 173 Program, 431 Kegiatan dan 1.098 Sub Kegiatan.

Dari isian Formulir T-C.19 atau Tabel 2.6 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan II bulan Mei Tahun 2024) Provinsi Bali (seperti dalam lampiran) yang telah diisi oleh masing-masing admin Perangkat Daerah, dapat diketahui:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel 2.12.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan II bulan Mei Tahun 2024) Provinsi Bali. (terlampir)

2.6.1. Realisasi program, kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan atau yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada triwulan (bulan Mei) II Tahun 2024.

Dari pengisian Tabel 2.12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan II bulan Mei Tahun 2024) Provinsi Bali, dapat diketahui realisasi anggaran dan rekapitulasi terhadap program, kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan atau yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.13 dan Tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.13.

Rekapitulasi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	REALISASI TRIWULAN II (SAMPAI DENGAN BULAN MEI)	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)
1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	2	15	49	214,522,660,831.00	100.00%	16,770,275,107.00	8.00%
2	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	2	2	59,301,250,742.00	100.00%	12,236,856,112.00	21.00%
	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	1	2	12	22	61,248,684,624.00	100.00%	9,359,683,827.00	15.00%
	BIRO ORGANISASI	1	4	9	22	3,652,196,410.00	100.00%	664,876,996.00	18.00%
	BIRO HUKUM	1	2	4	14	6,603,263,220.00	100.00%	1,243,934,742.00	19.00%
	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	3	8	17	40,153,293,360.00	100.00%	1,973,750,702.00	5.00%
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN	1	4	11	19	5,405,391,360.00	100.00%	352,562,852.00	7.00%
	(INDUK + 5 UPTD)	1	16	46	96	176,364,079,716.00	100.00%	25,831,665,231.00	14.17%
3	DINAS KEBUDAYAAN	1	5	12	31	83,363,616,868.00	100.00%	11,069,693,196.00	13.00%
	UPTD TAMAN BUDAYA	1	2	5	14	5,568,542,620.00	100.00%	557,914,544.00	10.00%
	UPTD MUSEUM BALI	1	2	5	16	4,325,129,700.00	100.00%	357,342,742.00	8.00%
	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI	1	2	5	17	5,557,853,308.00	100.00%	465,914,708.00	8.00%
	(INDUK + 3 UPTD)	1	11	27	78	98,815,142,496.00	100.00%	12,450,865,190.00	9.75%
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	3	13	46	0.00	100.00%	3,715,332,496.00	0.00%
5	DINAS KESEHATAN	1	5	13	32	280,872,270,176.00	100.00%	20,666,642.00	0.00%
	RUMAH SAKIT JIWA	1	2	3	4	39,242,290,442.00	100.00%	0.00	0.00%
	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA	1	2	2	2	84,425,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	4	7	9,527,564,370.00	100.00%	0.00	0.00%
	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	1	2	5	8	3,980,053,720.00	100.00%	0.00	0.00%



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	REALISASI TRIWULAN II (SAMPAI DENGAN BULAN MEI)	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)
	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	1	2	4	9	2,646,037,060.00	100.00%	0.00	0.00%
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA	1	2	3	5	231,084,229,596.00	100.00%	0.00	0.00%
	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN	1	2	6	10	10,134,866,040.00	100.00%	0.00	0.00%
	(INDUK + 7 UPTD)	1	18	40	77	661,912,311,404.00	100.00%	20,666,642.00	0.00%
6	DINAS PARIWISATA	1	5	13	25	15,115,655,997.00	100.00%	2,938,801,871.00	19.00%
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1	6	14	27	17,739,979,750.00	100.00%	0.00	0.00%
	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	1	1	1	1	8,009,040,280.00	100.00%	0.00	0.00%
	(INDUK + 1 UPTD)	1	7	15	28	25,749,020,030.00	100.00%	0.00	0.00%
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	8	13	23	20,360,295,020.00	100.00%	3,733,571,508.00	18.00%
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	1	2	4	9	550,946,120.00	100.00%	98,512,408.00	18.00%
	UPTD RUMAH KREATIF	1	2	4	7	1,022,110,880.00	100.00%	184,619,704.00	18.00%
	(INDUK + 2 UPTD)	1	12	21	39	21,933,352,020.00	100.00%	4,016,703,620.00	18.00%
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	2	10	27	49,451,684,083.00	100.00%	8,870,749,105.00	18.00%
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	6	12	20	25,434,096,772.00	100.00%	4,461,907,176.00	18.00%
	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1	2	5	9	1,132,405,291.00	100.00%	112,477,222.00	10.00%
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN	1	2	5	7	417,300,840.00	100.00%	27,274,805.00	7.00%
	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI	1	2	5	10	1,991,521,560.00	100.00%	159,916,439.00	8.00%
	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	1	2	5	10	2,805,790,269.00	100.00%	84,307,499.00	3.00%
	(INDUK + 4 UPTD)	1	14	32	56	31,781,114,732.00	100.00%	4,845,883,141.00	9.20%
11	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	10	32	36,023,268,248.00	100.00%	7,424,054,808.00	21.00%
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	2	11	34	26,272,787,369.00	100.00%	3,679,922,832.00	14.00%
	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	1	2	7	13	6,049,671,914.00	100.00%	722,017,204.00	12.00%
	(INDUK + 1 UPTD)	1	4	18	47	32,322,459,283.00	100.00%	4,401,940,036.00	13.00%
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	6	11	25	198,838,878,900.00	100.00%	56,478,725,872.00	28.00%
14	DINAS PERHUBUNGAN	1	4	12	25	24,484,780,630.00	100.00%	4,981,516,066.00	20.00%
	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	1	2	5	13	7,929,961,452.00	100.00%	341,837,806.00	4.00%
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	1	2	5	9	743,179,500.00	100.00%	225,716,210.00	30.00%
	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	1	2	5	12	2,701,198,172.00	100.00%	509,630,626.00	19.00%
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN	1	2	4	7	1,927,335,531.00	100.00%	230,444,586.00	12.00%
	(INDUK + 4 UPTD)	1	12	31	66	37,786,455,285.00	100.00%	6,289,145,294.00	17.00%
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	3	12	38	1,729,509,284,262.00	100.00%	478,773,838,194.00	28.00%



NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	REALISASI TRIWULAN II (SAMPAI DENGAN BULAN MEI)	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)
	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	2	4	11	3,650,343,080.00	100.00%	136,850,467.00	4.00%
	(INDUK + 1 UPTD)	1	5	16	49	1,733,159,627,342.00	100.00%	478,910,688,661.00	16.00%
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	3	9	27	141,622,365,056.00	100.00%	26,542,897,709.00	19.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG	1	2	4	17	5,387,969,583.00	100.00%	1,075,092,614.00	20.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	1	2	4	17	2,132,832,912.00	100.00%	300,569,063.00	14.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG	1	2	4	17	2,469,330,011.00	100.00%	463,345,426.00	19.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI	1	2	4	16	2,331,983,100.00	100.00%	415,195,980.00	18.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	1	2	4	16	3,399,046,117.00	100.00%	583,985,221.00	17.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA	1	2	4	16	2,330,383,092.00	100.00%	295,080,735.00	13.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	1	2	4	17	2,436,005,715.00	100.00%	383,082,295.00	16.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	1	2	4	17	5,100,606,414.00	100.00%	875,858,333.00	17.00%
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	1	2	4	17	5,456,296,906.00	100.00%	998,302,790.00	18.00%
	(INDUK + 9 UPTD)	1	21	45	177	172,666,818,906.00	100.00%	31,933,410,166.00	17.10%
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	1	5	10	38	168,993,725,334.00	100.00%	20,760,948,206.00	12.00%
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	6	11	20	0.00	100.00%	3,121,842,754.00	0.00%
19	BADAN PENGHUBUNG	1	2	7	17	8,718,553,744.00	100.00%	848,057,004.00	10.00%
20	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	2	8	20	88	1,893,598,861,986.00	100.00%	263,398,030,685.00	14.00%
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	2	5	15	2,223,412,600.00	100.00%	170,116,946.00	8.00%
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	2	1	3	5	660,856,360.00	100.00%	37,310,128.00	6.00%
	(INDUK + 2 UPTD)	2	11	28	108	1,896,483,130,946.00	100.00%	263,605,457,759.00	9.33%
21	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1	2	9	26	0.00	100.00%	2,406,367,887.00	0.00%
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	13	26	46	29,155,954,600.00	100.00%	4,518,374,218.00	15.00%
	UPTD PELAYANAN SOSIAL	2	2	5	22	7,167,898,920.00	100.00%	739,185,706.00	10.00%
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	2	3	6	12	1,014,459,560.00	100.00%	148,854,008.00	15.00%
	(INDUK + 2 UPTD)	2	18	37	80	37,338,313,080.00	100.00%	5,406,413,932.00	13.33%
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,	1	7	12	27	22,383,335,700.00	100.00%	4,497,807,249.00	20.00%



NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	REALISASI TRIWULAN II (SAMPAI DENGAN BULAN MEI)	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)
	KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL								
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	8	16	26	65,543,761,260.00	100.00%	2,867,161,339.00	4.00%
	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	2	3	5	12	1,885,877,840.00	100.00%	316,148,828.00	17.00%
	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	2	2	4	9	3,146,983,901.00	100.00%	524,230,194.00	17.00%
	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2	0	0	0	0.00	100.00%	0.00	0.00%
	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2	2	4	11	2,894,180,800.00	100.00%	857,132,829.00	30.00%
	(INDUK + 4 UPTD)	2	15	29	58	73,470,803,801.00	100.00%	4,564,673,190.00	13.60%
25	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2	9	15	26	320,202,900.00	100.00%	584,289,928.00	182.00%
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	2	2	5	13	36,703,000.00	100.00%	78,055,114.00	213.00%
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	2	2	4	11	30,702,700.00	100.00%	75,901,864.00	247.00%
	(INDUK + 2 UPTD)	2	13	24	50	387,608,600.00	100.00%	738,246,906.00	214.00%
26	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	1	2	8	15	478,805,256,196.00	100.00%	18,064,969,116.00	4.00%
27	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2	12	18	28	41,091,933,660.00	100.00%	7,690,657,837.00	19.00%
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	2	4	5	385,597,523.00	100.00%	19,911,304.00	5.00%
	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH	2	2	4	9	4,817,395,828.00	100.00%	762,571,778.00	16.00%
	UPTD TAHURA NGURAH RAI	2	1	3	7	400,282,040.00	100.00%	17,528,602.00	4.00%
	UPTD KPH BALI UTARA	2	1	3	9	1,340,672,700.00	100.00%	131,533,336.00	10.00%
	UPTD KPH BALI TIMUR	2	1	4	10	1,330,927,460.00	100.00%	77,441,349.00	6.00%
	UPTD KPH BALI SELATAN	2	1	3	11	644,458,170.00	100.00%	74,174,062.00	12.00%
	UPTD KPH BALI BARAT	2	1	3	10	864,229,820.00	100.00%	33,278,864.00	4.00%
	(INDUK + 7 UPTD)	2	21	42	89	50,875,497,201.00	100.00%	8,807,097,132.00	9.50%
28	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	15	26	63	347,671,552,051.00	100.00%	10,132,132,637.00	3.00%
	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	2	2	5	16	1,773,564,280.00	100.00%	181,515,657.00	10.00%
	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	2	1	1	1	29,055,977,464.00	100.00%	4,283,933,840.00	15.00%
	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	2	1	1	1	11,065,383,160.00	100.00%	3,853,381,575.00	35.00%
	(INDUK + 3 UPTD)	2	19	33	81	389,566,476,955.00	100.00%	18,450,963,709.00	15.75%
29	GOVERNUR	0	0	0	0	0.00	100.00%	0.00	0.00%
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	3	12	39	177,267,189,492.00	100.00%	10,670,881,163.00	6.00%
	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	1	2	5	7	1,183,313,780.00	100.00%	159,103,364.00	13.00%



NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			PAGU	Bobot Kinerja per Tahun (%)	REALISASI TRIWULAN II (SAMPAI DENGAN BULAN MEI)	
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)
	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	1	1	1	1	6,959,832,000.00	100.00%	1,415,189,190.00	20.00%
(INDUK + 2 UPTD)		1	6	18	47	185,410,335,272.00	100.00%	12,245,173,717.00	13.00%
TOTAL			268	631	1573	6,818,875,566,102.00	100.00%	1,028,416,925,801.00	18.09%

Sumber data: diolah

Tabel 2.14.

Rekapitulasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang Telah, Belum Mencapai Target dan yang Melebihi Target pada Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			YANG MENCAPAI TARGET PADA TW II			YANG TIDAK MENCAPAI TARGET		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1	2	15	49	1	2	10	1	13	39
2	SEKRETARIAT DAERAH	1	11	34	74	0	1	10	11	33	64
3	DINAS KEBUDAYAAN	1	6	14	38	0	0	3	6	14	35
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	3	13	46	0	0	5	3	13	41
5	DINAS KESEHATAN	1	5	16	42	0	1	3	5	15	39
6	DINAS PARIWISATA	1	5	13	25	1	1	6	4	12	19
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1	7	15	28	0	0	1	7	15	27
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	8	14	24	0	4	6	8	10	18
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	2	10	27	0	4	11	2	6	16
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	6	14	28	2	2	8	4	12	20
11	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	10	32	0	0	7	3	10	25
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	2	11	38	0	3	5	2	8	33
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	6	11	25	0	3	5	6	8	20
14	DINAS PERHUBUNGAN	1	4	15	33	0	0	3	4	15	30
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	3	12	39	0	0	4	3	12	35
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	3	9	29	3	7	23	0	2	6
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	1	5	10	38	0	2	9	5	8	29



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH			YANG MENCAPAI TARGET PADA TW II			YANG TIDAK MENCAPAI TARGET		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	6	11	20	2	3	4	4	8	16
19	BADAN PENGHUBUNG	1	2	7	17	2	3	8	0	4	9
20	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	2	8	20	98	0	7	30	8	13	68
21	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1	2	9	26	0	3	11	2	6	15
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	14	30	65	11	18	35	3	12	30
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	1	7	12	27	3	4	5	4	8	22
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	10	21	42	0	0	0	10	21	42
25	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2	9	16	28	4	4	7	5	12	21
26	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	1	2	8	15	0	1	3	2	7	12
27	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2	14	22	38	0	1	21	14	21	17
28	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	15	26	66	0	0	11	15	26	55
29	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	3	13	41	0	8	25	3	5	16
TOTAL			173	431	1098	29	82	279	144	349	819

* Program yang sama antara Perangkat Daerah dan UPTD dihitung dua.

Sumber: data diolah

Dari tabel 2.13 di atas dapat diketahui program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Dari total 173 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 29 program (16,76%) telah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), sebanyak 144 program (83,24%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei).



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Untuk level kegiatan sebanyak 431 kegiatan, 82 (19,03%) telah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), 349 kegiatan (80,97%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei).
3. Dari 1.098 sub kegiatan, sebanyak 279 (25,41%) sudah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), 819 (74,59%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei).

Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I dan II, seperti untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan II tahun 2024 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan pada Perangkat Daerah.

Terdapat beberapa perangkat daerah yang telah berkinerja dengan baik namun di samping itu pula terdapat beberapa perangkat daerah yang kinerjanya di dalam pencapaian target masih perlu ditingkatkan baik dari segi capaian kinerja fisik maupun serapan anggaran sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serta langkah-langkah strategis dalam setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal dan memperoleh solusi penanganan yang tepat berpedoman dengan perundangan-undangan yang berlaku.

2.6.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

1. Pergeseran anggaran yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai.
3. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian kinerja pada triwulan I dan II, seperti indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja.
4. Adanya kesalahan uraian belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
5. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1 atau 2.
6. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

2.6.3. Implikasi Terhadap Target Capaian Program RPD Dan Kinerja Pembangunan Daerah.

Dengan memperhatikan rekapitulasi terhadap program, kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan atau yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024 serta faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan II (bulan Mei) tahun 2024 akan berpotensi terhadap tidak tercapainya target akhir program pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sehingga



diperlukan adanya upaya-upaya strategis untuk dapat memaksimalkan setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam RPD dan RKPD dapat dicapai secara optimal.

2.6.4. Kebijakan Atau Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II (bulan Mei) mencakup evaluasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024.

Berkenaan dengan potensi terhadap tidak tercapainya target akhir program pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan program/kegiatan/sub kegiatan belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei) tahun 2024 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan maka perlu dilakukan:

1. Penyesuaian-penyesuaian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.
2. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan *output* yang berkualitas.
3. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran
4. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2024 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
5. Dukungan penganggaran *non-government* dalam meningkatkan efektivitas pencapaian indikator sasaran
6. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.
7. Evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback* atau umpan balik bagi perencanaan pembangunan dan akan menjadi salah satu *input* bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya



BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi hasil RKPd sampai dengan triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program, target dan dana dalam APBD Provinsi Bali tahun 2024 seluruhnya telah mengacu pada RKPd Provinsi Bali Tahun 2024 dan Perubahan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
2. Sebanyak 36 Perangkat Daerah sudah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil RKPd triwulan II (s.d bulan Mei) Tahun 2024 dalam aplikasi SiDalev dan secara manual.
3. Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi RKPd Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II mencakup evaluasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II. Dari total 173 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 29 program (16,76%) telah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), sebanyak 144 program (83,24%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei). Untuk level kegiatan sebanyak 431 kegiatan, 82 (19,03%) telah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), 349 kegiatan (80,97%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei) serta Dari 1.098 sub kegiatan, sebanyak 279 (25,41%) sudah mencapai target pada triwulan II (bulan Mei), 819 (74,59%) belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei).
4. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I dan II, seperti untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan II tahun 2024 kebanyakan adalah sub kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan pada Perangkat Daerah.
5. Terjadinya pergeseran anggaran dan terbatasnya anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sehingga tidak dapat maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

3.2. REKOMENDASI

1. Saat ini perangkat daerah dan unit perangkat daerah belum melakukan evaluasi triwulanan pelaksanaan Renja perangkat daerah, sehingga pengolahan data dan analisis triwulanan RKPd dibebankan sepenuhnya di Bappeda. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 idealnya evaluasi triwulanan RKPd bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah/unit perangkat daerah, sehingga Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja PD untuk menyusun evaluasi triwulanan RKPd. Dalam perspektif kedepan perangkat daerah/unit perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja.



2. Tata cara penentuan satuan indikator yang baik dan dapat diukur merupakan langkah awal dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi yang baik, hal ini dilakukan secara berjenjang dari Perangkat Daerah, verifikasi Renja di Bappeda dan reuiu APIP.
3. Memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (bulan Mei) Tahun 2024, maka perangkat daerah agar meningkatkan progress kinerja untuk mencapai target kinerja pada akhir tahun 2024.
4. Berkenaan dengan potensi terhadap tidak tercapainya target akhir program pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan program/kegiatan/sub kegiatan belum mencapai target pada triwulan II (bulan Mei) tahun 2024 serta terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun 2024 seperti kerangka ekonomi daerah, perkembangan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, maka dapat dilakukan Perubahan terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Perubahan RKPD juga untuk penyesuaian saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan berdasarkan audit yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

